

Keterbatasan dalam Kebebasan: Evaluasi Implementasi Kurikulum MBKM PTKIN

Namira Choirani Fajri^{1*}, Widayat Mintarsih², Ema Hidayanti³, Riyani Juaniati⁴

^{1,2,3,4} Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, Indonesia

*Email: namira.c@walisongo.ac.id (Corresponding Author)



DOI: <https://doi.org/10.53621/jider.v4i4.319>

Informasi Artikel

Riwayat Artikel:

Diterima: 30 Mei 2024

Revisi Akhir: 15 Juli 2024

Disetujui: 16 July 2024

Terbit: 20 Agustus 2024

Kata Kunci:

BKI;

BPI;

Kurikulum;

MBKM;

PTKIN.



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi kurikulum MBKM yang telah dilaksanakan di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Berjalannya kurikulum MBKM di PTKIN tentu tidak bebas dari tantangan serta harapan. Oleh karena itu, sebagai upaya mengoptimalkan program MBKM maka diperlukan evaluasi untuk menentukan rekomendasi langkah yang tepat. Data penelitian diperoleh dari *in depth interview*, *Focus Group Discussion*, dan dokumentasi catatan serta laporan pelaksanaan MBKM. Pengambilan data dilakukan pada Prodi BPI/BKI di tiga PTKIN, yaitu UIN Walisongo Semarang, UIN Saizu Purwokerto, dan IAIN Kudus sebagai sampel PTKIN yang ada di Jawa Tengah. Analisis data dalam penelitian kualitatif ini menggunakan *interaction analysis* model Miles dan Huberman dengan tiga alur kegiatan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari delapan kegiatan yang ditawarkan oleh program MBKM, hanya empat kegiatan yang sudah dan akan dijalankan oleh PTKIN. Empat kegiatan itu adalah pertukaran pelajar, magang, penelitian atau riset, dan KKN tematik. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan MBKM di PTKIN belum optimal. Pelaksanaan kurikulum MBKM yang harusnya menawarkan banyak kebebasan masih harus menemui tantangan dan hambatan yang kompleks. Kebebasan yang ditawarkan oleh kurikulum MBKM pun pada akhirnya masih terkungkung keterbatasan-keterbatasan sehingga implementasinya belum maksimal.

PENDAHULUAN

Pada Tahun 2020, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) (*Merdeka Belajar Kampus Merdeka*, 2020). Kebijakan ini mengubah kurikulum pendidikan yang sebelumnya telah dijalankan selama bertahun-tahun. Perubahan yang ditetapkan merupakan suatu keniscayaan mengingat bahwa sebuah lembaga pendidikan perlu menyikapi tantangan dan kecenderungan perubahan zaman (*Suryaman*, 2020). Begitu pula dengan peraturan menteri yang berkaitan dengan kurikulum MBKM ini. Hadirnya peraturan tersebut merupakan respons atas kebutuhan zaman.

Berjalannya program MBKM ini perlu mendapatkan evaluasi mendalam terhadap implementasinya. Penelitian-penelitian sebelumnya berfokus pada aspek konseptual dan potensi manfaat program secara umum, tetapi belum membahas tentang tantangan spesifik, hambatan, dan kebutuhan khusus yang dihadapi PTKIN dalam mengimplementasikan MBKM. Oleh sebab itu, penelitian ini melakukan evaluasi empiris yang memetakan sejauh mana kebebasan yang ditawarkan kurikulum dapat diimplementasikan di lapangan.

Pada luaran MBKM, mahasiswa disiapkan untuk menjadi sarjana yang tangguh, relevan dengan kebutuhan zaman, dan siap menjadi pemimpin. Melalui program merdeka belajar-kampus merdeka, mahasiswa tidak dicetak sebagai sarjana yang identik. Kurikulum merdeka belajar-kampus merdeka mengarahkan mahasiswa memperoleh kesempatan untuk meningkatkan keterampilan sesuai dengan minat dan bakatnya. Peningkatan kapasitas diri tersebut diatur dalam peraturan menteri. Mahasiswa pun diperbolehkan belajar di luar program studinya selama tiga semester. Pembelajaran yang lebih otonom dan fleksibel inilah yang mendorong terciptanya

lingkungan belajar yang inovatif, realistis, variatif, dan bebas bagi mahasiswa (Baharuddin, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa MBKM memberikan kebebasan yang luas untuk mahasiswa.

Kurikulum MBKM bertujuan agar mahasiswa tidak hanya unggul di bidang akademis, melainkan juga dapat memiliki keterampilan yang diperlukan pasar (Hasim, 2020). Hadirnya kurikulum MBKM ini pun disambut baik oleh mahasiswa. Di UIN Walisongo sendiri, tercatat bahwa persepsi mahasiswa mengenai kebijakan MBKM dapat dikategorikan positif (Rachma, 2022). Pada penelitian lain yang dilakukan oleh Kholik et al., (2022) tercatat bahwa 61,6% mahasiswa antusias mempersiapkan diri untuk mengikuti program MBKM. Hal senada juga diungkapkan Meke et al., (2022) dalam penelitiannya. Berdasarkan hasil penelitian tersebut mayoritas mahasiswa telah menyiapkan diri untuk mengikuti program MBKM. Begitu pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Suwanti et al., (2022). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mahasiswa yang telah mengimplementasikan kurikulum MBKM memiliki persepsi positif.

Di sisi lain, pelaksanaan MBKM tidak hanya berfokus pada kesiapan mahasiswa, melainkan juga bergantung pada kesiapan perguruan tinggi. Di PTKIN sendiri, kesiapan masing-masing perguruan tinggi memiliki level yang berbeda. Di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palopo kemampuan internal perguruan tinggi sudah dapat dikategorisasikan sangat kuat dan mampu mengatasi kelemahannya dalam penerapan kurikulum MBKM (Triani, 2023). Namun, di IAIN Parepare dan IAIN Ternate, fakultas belum dapat dinyatakan siap sepenuhnya dalam pelaksanaan MBKM (Rustan Efendy, Muh. Amri, 2023). Menyikapi perbedaan tersebut, maka penelitian ini menyajikan pandangan dari sudut pandang lain. Penelitian ini meninjau tentang implementasi pelaksanaan kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah.

Menyiapkan lulusan untuk menjadi pembelajar seumur hidup dan masyarakat yang siap menghadapi masa depan tidak terduga merupakan salah satu tujuan perguruan tinggi (Chan & Luk, 2022). Lembaga perguruan tinggi dengan ini tidak hanya bertugas mengimplementasikan program, melainkan juga mengevaluasi kinerja agar mampu beradaptasi dengan tantangan zaman. Evaluasi kurikulum merupakan suatu proses evaluasi terhadap konteks, proses, dan efektivitas kurikulum. Lebih dari sekadar mengungkapkan kelebihan dan kekurangan kurikulum, evaluasi juga dapat mendorong perbaikan pengajaran agar lebih tepat sasaran serta memberikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan selanjutnya (Zhao et al., 2017).

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk meninjau implementasi kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Peninjauan implementasi kurikulum MBKM dimulai dengan deskripsi konsep dan struktur MBKM di tiga Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah yang menjadi sampel penelitian. Selanjutnya, dilakukan identifikasi terhadap tantangan dan hambatan yang dialami oleh masing-masing PTKIN. Berbekal keduanya, berikutnya disimpulkan evaluasi atas pelaksanaan kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif untuk mengevaluasi implementasi kurikulum MBKM di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Pendekatan kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati (Lexy, 2011). Metode ini digunakan untuk menggali secara mendalam berbagai aspek terkait pelaksanaan kurikulum, termasuk tantangan dan hambatan yang dihadapi. Pendekatan kualitatif memberikan keleluasaan untuk memahami konteks, dinamika, dan persepsi para pelaksana program sehingga dapat menghasilkan gambaran yang komprehensif dan mendetail mengenai implementasi kurikulum MBKM. Penelitian ini difokuskan pada 3 PTKIN di Jawa Tengah yang mengimplementasikan Kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka yaitu UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Prodi BPI FDK UIN Walisongo Semarang, dan IAIN Kudus.

Sumber data primer adalah sumber data primer merujuk pada sumber informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yang dikumpulkan secara khusus untuk keperluan penelitian atau studi. Sumber data primer dapat berupa data yang dikumpulkan melalui wawancara, survei, observasi, dan penelitian lapangan langsung. Menurut Sekaran & Bougie (2016)

sumber data primer merujuk pada data yang diperoleh langsung dari sumbernya melalui metode penelitian seperti wawancara, observasi, atau pengumpulan data langsung.

Sumber data sekunder merujuk pada data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain untuk tujuan yang berbeda dan kemudian digunakan kembali oleh peneliti dalam studi atau penelitian mereka. Data sekunder dapat berupa data yang dipublikasikan dalam bentuk jurnal ilmiah, laporan penelitian, statistik pemerintah, basis data, atau sumber-sumber lain yang tersedia secara umum (Creswell, 2013). Data penelitian diperoleh melalui: 1) *in dept interview* kepada sumber primer; 2). *Focus Group Discussion* (FGD) yang melibatkan Wakil Dekan 1, Kaprodi/Sekprodi, dan *key persons* di atas; 3) Dokumentasi berupa catatan dan laporan pelaksanaan.

Teknik analisis data menggunakan *interaction analysis* model analisis Huberman & Miles (2002) yang terbagi dalam beberapa tahap. Pertama, *data reduction* artinya merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan hal-hal penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, disajikan data tentang konsep. Kedua, *data display* adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif, dan bisa dilengkapi dengan grafik, matrik, network dan chart. Pada tahap ini diharapkan peneliti mampu menyajikan data narasi tentang Konsep dan Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar kampus Merdeka Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah serta tantangan dan hambatnya. Ketiga, *conclusion drawing* atau *verification* maksudnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini merupakan tahap menjawab rumusan masalah, dan dapat menemukan temuan baru tentang evaluasi atas implementasi kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

1. Implementasi Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah

Tujuan MBKM dapat tercapai melalui berbagai bentuk kegiatan MBKM yang disarankan oleh pemerintah. Kegiatan tersebut berupa pertukaran pelajar, magang atau praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Berikut hasil identifikasi pelaksanaan kegiatan MBKM yang diimplementasikan di Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah. Adapun implementasi kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah tertuang dalam tabel berikut.

Tabel 1. Implementasi Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah

Kegiatan MBKM	UIN K.H. Prof. Saifuddin Zuhri Purwokerto	UIN Walisongo Semarang	IAIN Kudus
Pertukaran Pelajar	✓	✓	✓
Magang/Praktek Kerja	✓	✓	✗
Asistensi Mengajar	✗	✗	✗
Penelitian atau Riset	✓	✓	✓
Proyek Kemanusiaan	✗	✗	✗
Kegiatan Kewirausahaan	✗	✗	✗
Proyek Independen	✗	✗	✗
KKN Tematik	✓	✓	✓

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa dari delapan kegiatan yang dapat dilakukan untuk menunjang pelaksanaan pendidikan berbasis MBKM, baru empat di antaranya yang

terlaksana. Terlaksananya empat kegiatan tersebut pun belum dapat berjalan dengan maksimal. Uraian hasil tentang pelaksanaan kegiatan MBKM tersebut dipaparkan dalam poin-poin berikut.

a. Pertukaran Pelajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertukaran pelajar di Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah masih dominan antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Meskipun tata aturan MBKM memungkinkan dilakukannya pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda secara daring, tetapi implementasinya masih minim. Oleh karena itu, perlu adanya upaya untuk meningkatkan jumlah pertukaran pelajar antar program studi di berbagai perguruan tinggi. Perkuliahan daring dapat dijadikan sebagai opsi strategis untuk meminimalkan kesulitan bagi mahasiswa dan meningkatkan efektivitas pertukaran pelajar secara luas.

b. Magang/Praktek Kerja

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program magang merupakan program unggulan yang akan dilaksanakan di IAIN Kudus di semester mendatang. UIN Walisongo Semarang dalam program ini mengimplementasikannya dalam mata kuliah Praktik Pengalaman Profesi (PPP). Namun, karena keterbatasan dana maka pelaksanaannya tidak sesuai durasi yang diinginkan, yaitu 1-2 bulan. Di Prodi BPI UIN Walisongo Semarang program PPP hanya berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Hal ini menunjukkan bahwa program magang telah berjalan, tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai dengan ketentuan durasi yang diusulkan.

c. Asistensi Mengajar

Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada panduan dan dorongan khusus kepada mahasiswa untuk melaksanakan program asistensi mengajar. Dengan kata lain, PTKIN belum memfokuskan untuk melaksanakan keseluruhan amanat MBKM. Perlu dilakukan langkah-langkah lebih lanjut untuk memastikan kelancaran dan efektivitas program asistensi mengajar di satuan pendidikan bagi mahasiswa Prodi BPI/BKI PTKIN Jawa Tengah.

d. Penelitian atau Riset

Hingga saat ini, PTKIN masih berupaya untuk melatih mahasiswa dalam melakukan penelitian bersama dosen, memberikan ruang dan kesempatan bagi riset kolaboratif. Namun, program riset bersama lembaga riset belum diterapkan di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Terkait kebebasan riset, kelulusan mahasiswa tidak hanya terpaku pada skripsi; mahasiswa dapat lulus dengan tugas akhir berupa skripsi, penerbitan artikel, atau pembuatan karya yang sesuai dengan kompetensi luaran program studi. Dalam konteks Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah, program riset bersama lembaga riset belum sepenuhnya terlaksana. Meskipun PTKIN memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk melakukan riset kolaboratif dengan dosen, program riset bersama lembaga riset masih perlu lebih diaktifkan dan diintegrasikan ke dalam kurikulum. Langkah-langkah lebih lanjut perlu diambil untuk meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam kegiatan riset bersama lembaga riset di PTKIN Jawa Tengah.

e. Proyek Kemanusiaan

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa program proyek kemanusiaan di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah masih perlu regulasi yang lebih terstruktur. Konsep konversi nilai juga perlu diperjelas untuk menggantikan mata kuliah yang terkait dengan program proyek kemanusiaan. Hingga saat ini, jenis kegiatan ini belum diimplementasikan dan dimanfaatkan sebagai pengganti mata kuliah yang ada dalam kerangka MBKM di Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Upaya lebih lanjut perlu dilakukan untuk menyelaraskan proyek kemanusiaan dengan struktur kurikulum dan regulasi yang berlaku.

f. Kegiatan Wirausaha

Pada praktiknya, pembelajaran terkait wirausaha bagi mahasiswa BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah saat ini terbatas pada aspek teoritis di dalam kelas. Dengan kata lain, pembelajaran yang diterima bersifat lebih teoritis daripada praktis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan wirausaha belum diakui sebagai konversi SKS, dan regulasi terkait konversi nilai

masih belum jelas. Sebagai akibatnya, mahasiswa yang aktif dalam wirausaha belum dapat mengajukan konversi SKS, menyoroti perlunya klarifikasi regulasi agar kontribusi nyata dari kegiatan wirausaha dapat diakui dalam sistem akademik.

g. Proyek Independen

Mahasiswa sebagai generasi muda menunjukkan ketertarikan yang tinggi untuk menciptakan karya inovatif yang memajukan. Salah satu wujud dari aspirasi ini adalah melalui kegiatan studi atau proyek independen yang bertujuan untuk mewujudkan ide-ide kreatif mahasiswa dalam bentuk produk inovatif. Pada program studi BPI/BKI di PTKIN Jawa Tengah upaya untuk mewujudkan kegiatan ini masih dalam proses pengembangan. Hal ini menunjukkan perlunya dukungan dan perencanaan yang lebih matang agar mahasiswa dapat mengakses dan mengambil manfaat penuh dari kegiatan studi atau proyek independen dalam konteks MBKM.

h. KKN Tematik

Program KKN Tematik telah dilaksanakan di UIN Walisongo Semarang dan UIN Saizu Purwokerto. Pelaksanaan KKN Tematik telah menjadi bagian integral dari Program Studi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah, bahkan sebelum pemberlakuan kurikulum MBKM. Ini menegaskan bahwa KKNT telah menjadi suatu bentuk komitmen dalam menerapkan tri dharma perguruan tinggi, terutama dalam konteks pengabdian masyarakat.

2. Tantangan dan Hambatan Pelaksanaan Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah

Berdasarkan hasil wawancara dengan perwakilan dari Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah dan observasi, diperoleh hasil bahwa terdapat lima poin utama yang berkaitan dengan tantangan dan hambatan pelaksanaan MBKM. Adapun lima poin tersebut dijabarkan sebagai berikut.

a. Kurang Jelasnya Regulasi MBKM

Masing-masing PTKIN telah menerbitkan buku panduan untuk mendukung pelaksanaan MBKM. Namun, hadirnya buku panduan tersebut dinilai belum mampu menjelaskan keseluruhan regulasi MBKM yang sedang dan atau akan dilaksanakan. Di sisi lain, MBKM merupakan sistem baru yang memerlukan regulasi detail untuk meminimalkan kesalahan dalam pelaksanaannya.

MBKM merupakan inovasi pembelajaran yang baru dan masih dalam proses pengembangan. Regulasi MBKM yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 sudah memuat tujuan, prinsip implementasi, kebijakan, pengelolaan, dan evaluasi. Namun, pekerjaan rumah yang harus dikerjakan oleh perguruan tinggi adalah detail-detail pelaksanaan program. Adapun detail-detail yang perlu dijabarkan meliputi sistem pendaftaran, pelaksanaan, pembiayaan, dan penilaian. Perguruan tinggi memiliki wewenang untuk mengatur sistem-sistem tersebut, tetapi belum semua PTKIN di Jawa Tengah memiliki detail yang jelas untuk melaksanakannya.

Absennya detail-detail tersebut dalam regulasi MBKM menjadikan mahasiswa dan dosen ragu merekomendasikan program tersebut. Mahasiswa dan dosen pun kemudian masih diliputi keraguan untuk menjalankan program MBKM dengan sepenuhnya karena mendapat kekhawatiran akan birokrasi yang belum jelas dan berbelit. Oleh sebab itu, sejalan dengan tujuan untuk menyukseskan program MBKM, regulasi pelaksanaannya pun perlu detail.

Selain itu, diperlukan evaluasi terus menerus atas kekurangan pelaksanaan MBKM agar tercipta desain kurikulum yang sistematis dan tidak memberatkan seluruh civitas akademika. Kemudahan dan kejelasan sistematis pelaksanaan dapat meningkatkan kepercayaan diri mahasiswa, dosen, dan civitas akademika lainnya untuk mengikuti program ini. Beriringan dengan itu, minat mahasiswa untuk mengikuti program ini pun akan meningkat.

b. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Civitas Akademika

Mahasiswa dinilai belum memahami tujuan dan manfaat program MBKM. Hal ini menjadikan mahasiswa enggan mengikuti program ini. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa sebagian besar mahasiswa masih enggan mengikuti mata kuliah di luar

program studi. Hal ini dikarenakan nihilnya pengetahuan mahasiswa PTKIN di Jawa Tengah tentang tujuan dan manfaat MBKM. Problem serupa juga di Universitas Sahid Jakarta. Berdasarkan penelitian, diperoleh kesimpulan bahwa mahasiswa tertarik dengan program MBKM, tetapi pengetahuan mereka masih minim (Medhiatika et al., 2021). Oleh sebab itu, diperlukan sosialisasi secara mendalam dan berkala agar mahasiswa dapat memahami betul tujuan dan manfaat program MBKM.

Tidak hanya mahasiswa, tetapi dosen dan tenaga administrasi pun perlu mengetahui dengan detail dan update tentang pelaksanaan program MBKM. Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa belum semua dosen serta civitas akademika memiliki pengetahuan yang seragam terkait pelaksanaan MBKM di masing-masing PTKIN. Hal ini menyebabkan patahnya informasi antara civitas akademika satu dengan yang lainnya sehingga program belum dapat dilaksanakan dengan optimal. Sebab itu, sosialisasi idealnya tidak hanya berfokus kepada mahasiswa saja, melainkan seluruh civitas akademika

c. Kurangnya Kemampuan Sumber Daya

Berdasarkan hasil wawancara, tidak semua mahasiswa memperoleh *output* yang ia butuhkan setelah mengikuti program MBKM. Mata kuliah yang menjadi pilihannya ternyata dinilai tidak sesuai dengan keilmuan yang ia jalani. Untuk itu, mahasiswa perlu lebih adaptif untuk belajar di luar zona nyamannya. Sebelum memilih dan mengikuti program MBKM, mahasiswa tentu perlu mengetahui *output* yang akan diperoleh. Dalam hal ini, mahasiswa juga akan mempelajari hal yang baru di luar kebiasaannya. Oleh sebab itu, mahasiswa perlu mencari tahu dan belajar lebih giat untuk memutuskan kegiatan MBKM yang lebih sesuai dengan kebutuhannya.

Selain mahasiswa, dosen pun kerap kali masih menemui kesulitan apabila berhadapan dengan mahasiswa dari luar program studi. Dosen masih terbiasa mengajar mahasiswa prodi sendiri sehingga terminologi serta kemampuan menjelaskannya masih terbatas. Oleh karena itu, tidak hanya mahasiswa yang harus menyesuaikan diri, tetapi pengajar atau dosen pun harus siap keluar dari zona nyamannya.

Tenaga administrasi dan pemangku kebijakan pun perlu meningkatkan kapasitasnya untuk menyukseskan program MBKM. Salah satunya adalah dalam proses transfer mata kuliah sekaligus nilai dari Prodi asal ke Prodi tujuan MBKM. Proses ini masih sering mengalami kendala sehingga mahasiswa pun sulit mentransfer nilai sebagai bentuk haknya setelah menjalankan MBKM sesuai prosedur. Problem ini pula lah yang menghalangi minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM.

d. Kurangnya Ketersediaan Mitra PTKIN

Salah satu faktor utama dalam kelancaran pelaksanaan MBKM. Setiap bentuk kegiatan yang ditawarkan oleh program MBKM memerlukan mitra. Tanpa mitra, baik mitra perguruan tinggi ataupun perusahaan, kegiatan MBKM tidak dapat berjalan dengan maksimal. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa kerja sama yang dibangun di PTKIN masih didominasi sebatas perjanjian kerja sama di atas kertas. Namun, perjanjian tersebut belum menyertakan kebijakan-kebijakan kerja sama yang konkret sehingga belum dapat diimplementasikan.

Adanya mitra MBKM dinilai sangat penting. Mitra membantu mahasiswa memperoleh kesempatan untuk mengimplementasikan teori yang dipelajari di bangku kuliah. Selain itu, adanya mitra membantu mahasiswa menerapkan keterampilan umum dan khusus di dunia kerja. Menurut penelitian sebelumnya yang dilakukan di Universitas Sajanawiyata Tamansiswa ditemukan bahwa mitra dapat meningkatkan mutu lulusan yang siap bersaing (Aswita, 2022). Hasil serupa juga diperoleh dari penelitian di Universitas Muhammadiyah Riau. Mitra membantu meningkatkan kompetensi mahasiswa baik secara *hard skill* maupun *soft skill* (Arisandi et al., 2022). Mitra memegang peranan penting dalam implementasi kegiatan MBKM. Oleh sebab itu, ketersediaan mitra harus dijadikan salah satu prioritas untuk optimalisasi pelaksanaan kurikulum MBKM.

e. Kurangnya Ketersediaan Teknologi Informasi yang Dibutuhkan

Saat ini, masing-masing PTKIN telah memiliki sistem teknologi informasi untuk membantu, tetapi hadirnya sistem teknologi informasi tersebut dinilai masih belum dapat memenuhi kebutuhan. UIN Walisongo telah memiliki sistem teknologi informasi yang menghubungkan antara mahasiswa calon peserta kurikulum MBKM dengan Prodi. Begitu pula dengan UIN Saizu Purwokerto dengan aplikasi SIPINTER dan IAIN Kudus dengan aplikasi SIKADU serta MERPATI. Namun, berdasarkan hasil wawancara, kehadiran teknologi informasi tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan penyelenggara. Hadirnya teknologi informasi dinilai dapat mempermudah pelaksanaan MBKM.

f. Belum Adanya Transparansi Alokasi Dana untuk Pelaksanaan MBKM

Pendanaan merupakan salah satu aspek yang memperoleh perhatian khusus dari mahasiswa. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh data bahwa aspek ini mempengaruhi minat mahasiswa mengikuti MBKM. Kaprodi UIN Walisongo mengungkapkan bahwa anggaran yang dialokasikan masih sebatas kegiatan reguler seperti untuk Praktik Pengalaman Profesi (PPP) dan Praktik Profesi Dakwah (PPD). Namun, alokasi dana untuk kegiatan MBKM dalam bentuk lain belum ada. Hal ini merupakan salah satu hambatan mengingat mengikuti MBKM merupakan hak mahasiswa, bukan kewajiban. Oleh karena hal ini bukan merupakan kewajiban, maka mahasiswa keberatan untuk mengeluarkan dana pribadi. Dari sini, dapat disimpulkan bahwa alokasi dana untuk kelancaran pelaksanaan MBKM diperlukan. Perguruan tinggi harus mengambil langkah untuk menentukan kebijakan yang tepat untuk menjembatannya.

Pembahasan

Perubahan kurikulum merupakan respons atas perubahan zaman. Pada perjalanannya, kurikulum perguruan tinggi sebelumnya berfokus pada pengembangan hard skill. Mahasiswa difokuskan untuk melakukan transfer pengetahuan teoritisnya. Namun, seiring perkembangannya, mahasiswa dibekali dengan kemampuan *soft skill* sebagai upaya untuk mempersiapkan mereka menghadapi tantangan zaman.

Tuntutan zaman memberikan dorongan kepada perguruan tinggi untuk menyiapkan SDM yang inovatif agar dapat meraih capaian pembelajaran yang optimal dan sesuai kebutuhan masa ([Sabriadi, 2020](#)). Oleh karena itu, pengembangan soft skill untuk mendampingi hard skill mahasiswa sangat diperlukan. Pengembangan soft skill perlu memperhatikan integrasi kurikulum dan ekstrakurikuler. Namun, integrasi ini bukanlah hal yang mudah untuk diajarkan di bangku perkuliahan ([Rohaeni & Wijiharta, 2022](#)). Berbagai kendala yang berkaitan dengan pola penyelenggaraan program ekstrakurikuler pun terjadi di tingkat pendidikan tinggi yang lebih kompleks.

Hadirnya kurikulum Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) menyajikan paradigma baru dalam dunia pendidikan tinggi Indonesia. Konsep ini berfokus pada pemberian kemerdekaan yang lebih besar kepada mahasiswa dalam menentukan jalannya pendidikan. Pokok-pokok dari kebijakan MBKM meliputi: (1) pembukaan program studi baru yang diatur pada Permendikbud No. 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta, serta Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (2) sistem akreditasi perguruan tinggi yang diatur pada Permendikbud No. 5 Tahun 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi; (3) perguruan tinggi badan hukum yang diatur pada Permendikbud No. 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Tinggi Negeri menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dan Permendikbud No 6 Tahun 2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri; dan (4) hak belajar tiga semester di luar program studi yang diatur pada Permendikbud No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi ([Yusuf & Arfiansyah, 2021](#)).

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang MBKM telah dikeluarkan sejak tahun 2020. Namun, pada praktiknya, masing-masing perguruan tinggi memiliki kebijakan dan kesiapan

yang berbeda dalam pelaksanaan MBKM. Ketiga Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) Jawa Tengah yang menjadi sampel pada penelitian ini memulai kurikulum MBKM selama kurun waktu 2022-2023. UIN Walisongo Semarang dan UIN Saizu Purwokerto memulai kurikulum MBKM pada tahun 2022, sedangkan IAIN Kudus menyusul pada tahun 2023.

Prodi BPI/BKI dari PTKIN yang menjadi sampel penelitian seluruhnya telah menyusun program sesuai amanah yang tertuang pada peraturan menteri, yaitu mengalokasikan 40-60 sks untuk pelaksanaan kurikulum MBKM. Ketiga PTKIN telah menyusun kurikulum MBKM sejak turunya peraturan menteri tahun 2020, tetapi pelaksanaannya berlangsung di tahun yang berbeda. Penyusunan kurikulum baru ini pun telah disesuaikan dengan era revolusi industri 4.0 sebagai upaya mempersiapkan lulusan ke dunia kerja. Kurikulum MBKM yang dikembangkan sesuai era revolusi industri ini memang telah umum digunakan. Prodi Hadits UIN Imam Bonjol Padang pun sudah menggunakan kurikulum MBKM berbasis era revolusi industri 4.0 (Fatia & Gusmaneli, 2022). Tidak hanya pada tataran jenjang strata pertama, penyesuaian kurikulum dengan era revolusi industri 4.0 juga dilakukan di jenjang strata kedua. Perubahan ini dilakukan di IAIN Purwokerto (saat ini menjadi UIN Saizu Purwokerto). Dalam latar belakang penyusunannya, PTKIN tersebut menjabarkan dinamika perubahan kurikulum yang disesuaikan oleh zaman juga harus diterapkan di jenjang pendidikan, termasuk pascasarjana (Sunhaji & Misbah, 2021).

Berdasarkan tinjauan dari beberapa PTKIN tersebut, diketahui bahwa susunan mata kuliah MBKM tidak hanya sebatas pengubahan skema perkuliahan, tetapi juga mempertimbangkan mata kuliah yang kompatibel untuk menghadapi perubahan zaman. Prinsip ini turut mendukung tujuan utama dari diselenggarakannya kurikulum MBKM. Artinya, PTKIN di Jawa Tengah sudah dapat dikatakan responsif untuk penyusunan basis kurikulum yang baru dan sudah mempertimbangkan luaran agar sejalan dengan amanat yang tertuang dalam peraturan menteri.

Penyusunan kurikulum baru telah diikuti juga dengan penerbitan buku panduan akademik. UIN Walisongo Semarang telah mengeluarkan panduan pada tahun 2020, sementara UIN Saizu Purwokerto merilis panduan terbarunya pada tahun 2022. Selain itu, IAIN Kudus juga memiliki panduan akademik MBKM yang diterbitkan pada tahun 2021. Panduan-panduan ini menjadi landasan yang digunakan oleh masing-masing Prodi untuk mengarahkan pengembangan dan pelaksanaan MBKM di lingkungan akademik mereka. Saat menyusun panduan akademik untuk MBKM, Prodi BPI/BKI di semua PTKIN Jawa Tengah mengacu pada prinsip-prinsip MBKM yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan begitu, mereka menegaskan komitmen untuk mematuhi regulasi yang berlaku dalam menyusun panduan akademik MBKM sebagai bagian integral dari penyelenggaraan program tersebut.

Adanya buku panduan akademik merupakan salah satu komponen penting sebelum melaksanakan kurikulum. Perguruan tinggi yang akan menyelenggarakan kurikulum MBKM pun menyusun buku panduan sebagai salah satu bentuk kesepakatan serta landasan pelaksanaan kuliah (Sopiansyah et al., 2022). Selain itu, penyusunan buku panduan merupakan serangkaian proses akademik untuk menganalisis kebutuhan agar seluruh tahapan pelaksanaan kurikulum masih berpegang pada Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan bahan kajian yang telah disepakati (Effendi et al., 2021),

Hadirnya buku panduan ini merupakan langkah awal yang baik untuk kelancaran pelaksanaan MBKM. Di sisi lain, berdasarkan hasil wawancara, tidak semua dosen di PTKIN memahami isi buku panduan MBKM. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perwakilan dari PTKIN yang menjadi objek penelitian sepakat bahwa masih diperlukannya sosialisasi lebih lanjut kepada dosen agar pemahaman tentang MBKM diperbarui secara berkala.

Selain sosialisasi berkala kepada jajarannya dosen, sosialisasi kepada mahasiswa pun dinilai penting. Sejauh ini, dosen wali dan Kaprodi telah mengedukasi dan memberi motivasi mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Namun, edukasi tersebut masih dinilai kurang sehingga minat mahasiswa untuk mengikuti MBKM pun belum tinggi. Mahasiswa UIN Walisongo yang mengikuti program MBKM masih minim, mahasiswa UIN Saizu Purwokerto yang mengikuti MBKM sekitar 20%, dan mahasiswa IAIN Kudus belum ada yang mengikuti program MBKM.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh [Pratama & Astuti \(2023\)](#) diketahui bahwa faktor internal memiliki pengaruh lebih signifikan daripada faktor eksternal dalam hal ketertarikan mahasiswa untuk mengikuti program MBKM. Faktor internal yang memiliki dampak besar adalah pengetahuan dan motivasi mahasiswa. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan motivasi yang lebih dalam serta menyeluruh untuk meningkatkan minat keikutsertaan mahasiswa. Edukasi dan motivasi ini pun tidak sebatas kepada dosen saja atau mahasiswa saja, melainkan seluruh civitas akademika agar seluruhnya dapat bahu-membahu menyukseskan program MBKM.

Dari segi kerja sama, UIN Walisongo Semarang telah melakukan serangkaian kerjasama dengan berbagai universitas melalui *Memorandum of Understanding (MoU)* dalam konteks Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM). Meskipun telah ada sejumlah perjanjian kerjasama yang ditandatangani dengan beberapa prodi BKI dan BPI di berbagai universitas IAIN dan STAIN di Indonesia, kenyataannya implementasi MoU tersebut belum berjalan secara komprehensif. Kerjasama yang tertera dalam MoU pada umumnya masih belum terwujud secara formal. Mahasiswa hanya terlibat dalam mengikuti mata kuliah atau pertukaran dosen tamu sebagai langkah awal dari kemitraan MBKM. Namun, pembelajaran yang melibatkan pengalaman penuh di luar prodi atau pertukaran mahasiswa antar perguruan tinggi yang telah disepakati dalam MoU, hingga kini masih belum terealisasi sepenuhnya.

Sementara itu, UIN Saizu Purwokerto telah menjalin kemitraan dengan Universitas Padjajaran Bandung (Unpad). Kerjasama ini berfokus pada pelaksanaan perkuliahan online MBKM yang terjadi antara kedua institusi tersebut. Program ini memiliki bobot setara dengan 3 Satuan Kredit Semester (SKS) yang diikuti oleh mahasiswa. Adanya kemitraan ini menandai langkah awal dalam implementasi MBKM yang melibatkan praktik pembelajaran lintas prodi dan perguruan tinggi yang telah terlaksana dengan baik.

Di sisi lain, IAIN Kudus pada awal pelaksanaan MBKM belum berhasil menjalin kemitraan dengan institusi pendidikan luar kampus. Pada tahap awal implementasi, belum terdapat mitra dari luar kampus yang terlibat dalam program MBKM. Meskipun demikian, upaya untuk membentuk kemitraan dan kerjasama dengan perguruan tinggi lainnya masih menjadi fokus untuk memperluas jaringan dan peluang pembelajaran lintas perguruan tinggi bagi mahasiswa IAIN Kudus di masa mendatang.

Program kerja sama antar-universitas memiliki peranan penting bagi minat mahasiswa untuk mengikuti program MBKM ([Yunitasari & Rahmadanik, 2023](#)) selain faktor internal seperti edukasi dan motivasi. Sebagai upaya peningkatan minat mahasiswa terhadap program MBKM perlu pula memperbanyak mitra. Selain itu, adanya mitra juga turut meningkatkan pengalaman pembelajaran sehingga mahasiswa dapat lebih fleksibel dan adaptif ([Wianto et al., 2023](#)). Formula yang digunakan oleh UIN Saizu Purwokerto, yaitu penyelenggaraan kuliah daring dalam pelaksanaan kuliah bersama mitra-universitas dapat dijadikan sebagai tahap awal yang baik. Strategi ini dapat diterapkan di PTKIN lain agar mempermudah proses dan mobilisasi perkuliahan berbasis MBKM.

Selain mitra universitas, ketiga PTKIN di Jawa Tengah juga masih kesulitan untuk membangun kerja sama dengan mitra industri. Padahal, adanya mitra industri dalam pelaksanaan MBKM memegang fungsi penting. Perguruan tinggi dan mitra dapat melakukan simbiosis mutualisme. Kedua belah pihak yang bekerja sama dapat melakukan diskusi serta pengenalan model dunia kerja dengan karakteristik industri. Dalam hal ini, industri bisa melibatkan diri untuk membekali mahasiswa tentang dunia praktisi. Selain itu, mitra industri juga dapat memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk berinovasi ketika menyelesaikan masalah di lapangan. Dengan begitu, pengalaman yang diperoleh mahasiswa lebih nyata dan komprehensif ([Fatah, 2021](#)).

Berdasarkan paparan di atas, diketahui bahwa dari delapan bentuk kegiatan yang diusulkan baru, baru empat program yang dijalankan di Prodi BPI/BKI Jawa Tengah. Adapun empat kegiatan tersebut adalah pertukaran pelajar, magang, dan KKN Tematik. Penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa dari delapan kegiatan MBKM yang ditawarkan, baru empat di antaranya yang sering diimplementasikan di universitas. Pertama, pertukaran pelajar seperti yang dilakukan di Universitas 17 Agustus 1945 dan Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ([Yunitasari & Rahmadanik, 2023](#)). Selain itu, kegiatan yang masih berhubungan dengan pertukaran pelajar adalah pertukaran

dosen dan mahasiswa yang dilakukan oleh Pascasarjana IAIN Curup ke Pascasarjana UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi dan Pascasarjana UIN Sultan Kasim Riau ke Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang (Sumarto & Harahap, 2022). Kedua, kegiatan pengabdian ke masyarakat dan magang yang dilakukan oleh mahasiswa Institut Teknologi Nasional Yogyakarta (Astutik & Tondang, 2024). Ketiga, penelitian atau riset yang mewadahi mahasiswa untuk melakukan penelitian selain skripsi. Keempat, pelaksanaan kegiatan MBKM yang berfokus pada kegiatan magang sebagai sarana peningkatan soft skill dan hard skill mahasiswa Universitas Muhammadiyah Riau (Putra, 2023). Dominasi empat bentuk kegiatan MBKM tersebut di antara 8 yang diusulkan menunjukkan bahwa kebebasan yang ditawarkan oleh program kurikulum MBKM belum sepenuhnya dapat diimplementasikan di perguruan tinggi Indonesia.

KESIMPULAN

Kurikulum berbasis MBKM telah dilaksanakan di 3 Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah. Namun, berdasarkan hasil yang diperoleh, diketahui bahwa dari 8 program MBKM yang dicanangkan oleh Kemdikbud, tercatat hanya empat program yang dijalankan oleh PTKIN. Empat program tersebut meliputi: pertukaran pelajar, magang, penelitian atau riset, dan KKN tematik. Hal ini menunjukkan bahwa implementasi MBKM masih belum maksimal. Evaluasi yang dilakukan menunjukkan bahwa kebebasan yang ditawarkan oleh program MBKM ternyata masih terhalang keterbatasan yang dimiliki oleh PTKIN. Upaya yang sudah dilakukan PTKIN, yaitu penyusunan kurikulum, buku panduan, dan pelaksanaan sosialisasi ternyata belum dapat menyelesaikan kendala pelaksanaan MBKM. Keterbatasan yang masih dimiliki PTKIN dalam rangka pelaksanaan MBKM meliputi: kurang jelasnya regulasi MBKM yang dibuat oleh masing-masing PTKIN, kurangnya pengetahuan dan kesadaran civitas akademika, kurangnya kemampuan sumber daya, kurangnya kesediaan mitra PTKIN, kurangnya kesediaan teknologi informasi yang dibutuhkan, dan belum adanya transparansi alokasi dana untuk pelaksanaan MBKM. Adanya keterbatasan di tengah kebebasan yang ditawarkan itulah yang menjadi faktor utama penghalang optimalisasi implementasi pelaksanaan MBKM di PTKIN. Tanpa penyelesaian atas keterbatasan yang ada, kebebasan yang ditawarkan oleh MBKM pun akan menjadi sebatas angan bagi mahasiswa PTKIN.

UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel jurnal ini ditulis berdasarkan hasil penelitian Implementasi Kurikulum MBKM Prodi BPI/BKI PTKIN di Jawa Tengah yang dibiayai oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisandi, D., Mutiara, M. W., & Mawardi, V. C. (2022). Dampak kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) magang dan studi independen dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 6(1), 174–181.
- Astutik, H. P., & Tondang, B. C. (2024). Pendampingan Mahasiswa Implementasi MBKM Kegiatan Magang di Dinas Perhubungan Kota Yogyakarta. *INTEGRITAS: Jurnal Pengabdian*, 8(1), 31–45.
- Aswita, D. (2022). Merdeka belajar kampus merdeka (MBKM): inventarisasi mitra dalam pelaksanaan magang Mahasiswa fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. *Prosiding Seminar Nasional Biologi, Teknologi Dan Kependidikan*, 9(2), 56–61.
- Baharuddin, M. R. (2021). Adaptasi kurikulum merdeka belajar kampus merdeka (Fokus: model MBKM program studi). *Jurnal Studi Guru Dan Pembelajaran*, 4(1), 195–205.
- Chan, C. K. Y., & Luk, L. Y. Y. (2022). Eight years after the 3-3-4 curriculum reform: The current state of undergraduates' holistic competency development in Hong Kong. *Studies in Educational Evaluation*, 74, 101168.
- Creswell, J. W. (2013). *Steps in conducting a scholarly mixed methods study*.

- Effendi, D. I., Lukman, D., Eryanti, D., & Garnita, A. (2021). *Dokumen Kurikulum Mbkm-Kkni Bki Fdk Uin Sgd Bandung*.
- Fatah, A. (2021). Eksplorasi Dukungan Industri Mitra Dalam Pelaksanaan Magang Pada Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. *Seminar Nasional Teknologi Pembelajaran*, 1(1), 282–290.
- Fatia, A., & Gusmaneli, G. (2022). The development of the curriculum of the science of hadith study program in univercities highly islamic religion. *2nd UIN Imam Bonjol International Conference on Islamic Education*, 1–11.
- Hasim, E. (2020). Penerapan kurikulum merdeka belajar perguruan tinggi di masa pandemi covid-19. *E-Prosiding Pascasarjana Universitas Negeri Gorontalo*.
- Huberman, M., & Miles, M. B. (2002). *The qualitative researcher's companion*. sage.
- Kholik, A., Bisri, H., Lathifah, Z. K., Kartakusumah, B., Maufur, M., & Prasetyo, T. (2022). Impelementasi kurikulum Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) berdasarkan persepsi dosen dan mahasiswa. *Jurnal Basicedu*, 6(1), 738–748.
- Lexy, J. M. (2011). *Qualitative research methods*. Bandung: Teenager Rosda Karya.
- Medhiatika, N. L. M. V., Ratnasari, K., & Farida, F. (2021). Analisis Ketertarikan Mahasiswa Manajemen atas Kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Sahid Jakarta. *Management and Accounting Expose*, 4(2).
- Meke, K. D. P., Astro, R. B., & Daud, M. H. (2022). Dampak Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada Perguruan Tinggi Swasta di Indonesia. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 675–685.
- Merdeka Belajar Kampus Merdeka. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, 'Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka', Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan, 2020.
- Pratama, A., & Astuti, C. D. (2023). PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP MINAT MAHASISWA AKUNTANSI UNTUK MENGIKUTI PROGRAM MBKM. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 2038–2050.
- Putra, M. Y. (2023). Eksplorasi Kegiatan Mahasiswa dalam Program Magang MBKM: Studi Kasus di PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk, Kantor Cabang Pekanbaru. *Inisiatif: Jurnal Dedikasi Pengabdian Masyarakat*, 2(1), 25–31.
- Rachma, N. L. F. (2022). *Analisis persepsi mahasiswa mengenai kebijakan merdeka belajar-kampus merdeka di UIN Walisongo Semarang*.
- Rohaeni, A., & Wijiharta, W. (2022). Training soft skill bekal kesuksesan lulusan perguruan tinggi. *Youth & Islamic Economic Journal*, 3(01), 6–13.
- Rustan Efendy, Muh. Amri, S. Y. (2023). *Idealitas dan Realitas Merdeka Belajar Kampus Merdeka: Studi Komparatif pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri*.
- Sabriadi, H. R. (2020). Manifestasi hidden curriculum dalam pendidikan agama islam. *Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 19(1), 947–954.
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A skill building approach*. john wiley & sons.
- Sopiansyah, D., Masruroh, S., Zaqiah, Q. Y., & Erihadiana, M. (2022). Konsep dan Implementasi Kurikulum MBKM (Merdeka Belajar Kampus Merdeka). *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 4(1), 34–41.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan RND*. Alfabeta.
- Sumarto, S., & Harahap, E. K. (2022). Bentuk Kerja Sama Pascasarjana IAIN Curup dalam Penerapan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (Mbkm). *Jurnal Literasiologi*, 8(2), 556627.

- Sunhaji, H., & Misbah, M. (2021). *Evaluasi Kurikulum Pascasarjana PTKIN di Era Revolusi Industri 4.0 (Teori dan Implementasinya)* (Vol. 1). Zahira Media Publisher.
- Suryaman, M. (2020). Orientasi pengembangan kurikulum merdeka belajar. *Seminar Nasional Pendidikan Bahasa Dan Sastra*, 13–28.
- Suwanti, V., Suastika, I. K., Ferdiani, R. D., Harianto, W., & Ketut Suastika, I. (2022). Analisis dampak implementasi program mbkm kampus mengajar pada persepsi mahasiswa. *JURNAL PAJAR (Pendidikan Dan Pengajaran)*, 6(3), 814–822.
- Triani, H. (2023). *ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN PROGRAM MBKM (MERDEKA BELAJAR-KAMPUS MERDEKA) DI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM IAIN PALOPO*. Institut Agama Islam Negeri Palopo.
- Wianto, E., Tjandra, M., Clara, B., & Fiona, S. (2023). Fleksibilitas Kurikulum MBKM dalam Menanggapi Dinamika Proyek Kemanusiaan. *Jurnal ABDINUS: Jurnal Pengabdian Nusantara*, 7(2), 475–485.
- Yunitasari, R., & Rahmadanik, D. (2023). Implementasi MBKM Terhadap Minat Pertukaran Mahasiswa Program Studi Administrasi Negara. *Journal of Administrative and Social Science*, 4(1), 88–93.
- Yusuf, M., & Arfiansyah, W. (2021). Konsep “merdeka belajar” dalam pandangan filsafat konstruktivisme. *AL-MURABBI: Jurnal Studi Kependidikan Dan Keislaman*, 7(2), 120–133.
- Zhao, D., Ma, X., & Qiao, S. (2017). What aspects should be evaluated when evaluating graduate curriculum: Analysis based on student interview. *Studies in Educational Evaluation*, 54, 50–57.